

Nasionalisme dan Perjalanan Demokrasi

Asnawi Umar Ali

In Indonesia the nationalism discourse has been placed on the debate between Tjipto Mangoen Koesoemo and Soetatmo Soerjokoesoemo. Tjipto established the Budi Utomo and the Indische Partij, meanwhile Soetomo founded the Javanese Nationalism Committee. In 1918 the debate was published as flyers entitle "Javanese of Indische Nationalism." Soetatmo made the Javanese nationalism more in progress based on the language and culture for the national interest. On this perspective, Soetatmo proposed the role of the pandito as the creator of peace on the chaos movement by improving the relationship between people and princes; in this regard the people became the ordinary people devoting to the lord. On the other side, Tjipto stood with his Indische nationalism due to the reincarnation of the true noble with its glorious morality, through the resistance with no compromise for the oppression and exploitation conducted by the Dutch and the upper class (priyayi) to the ordinary people.

Kata kunci: *wacana, nasionalisme, dan demokrasi*

Ide nasionalisme bukanlah ide yang sangat tua, setidaknya rentang waktu akhir abad kedelapan belas dan awal abad kesembilan belas dapat dijadikan acuan. Meskipun ide tentang negara dan bangsa sendiri sudah berusia berabad-abad dan dapat dirunut jauh sampai pada pemikir seperti Plato dan Aristoteles, tapi bangun diskursus nasionalisme baru dimulai pada para pemikir modern, seperti John Locke dan Fichte. Untuk pembahasan ini diskursus nasionalisme yang dimaksud mengacu pada nasionalisme modern.

Secara umum, nasionalisme sering dikaitkan dengan Revolusi Prancis, industrialisasi, liberalisme, dan sentimen bangsa, yakni sebuah struktur baru yang disebut modern yang menggantikan struktur klasik masyarakat yang bersifat lokal dan feodal. Secara historis kemunculan

nasionalisme berangkat dari sebuah struktur klasik masyarakat yang represif terhadap rakyat dan memihak kelompok minoritas tertentu (seperti bangsawan misalnya).

Secara semantik, istilah "Nasionalisme" sebenarnya agak membingungkan, mengingat penggunaannya yang bersifat luas yang mengacu pada makna yang berbeda-beda. Istilah ini sering berkait dengan istilah bangsa (*nation*), kebangsaan (*nationality*), dan negara (*state*). Namun secara etimologis terlihat bahwa nasionalisme berakar pada bangsa dan meluas pada (ke)bangsa(an). Menurut Louis L. Snyder istilah "kebangsaan" (*nationality*) mengacu atau digunakan dalam makna (obyektif atau eksternal) yang kongkrit (bahasa nasional, wilayah, negara, peradaban, dan sejarah), atau dalam makna (subyektif, internal, atau ideal) yang abstrak (kesadaran nasional, atau sentimen). Untuk

memahami lebih jelas tentang nasionalisme, terutama tentang nasionalisme Indonesia, sebuah penjelelahan historis diperlukan. Berarti kita mencoba menggali artefak-artefak nasionalisme dan membaca pesan-pesannya. (Kurniawan :1996)

Dalam sejarah Perancis situasi ini dialami pada masa rezim lama dengan penjara Bastille sebagai simbolnya. Pada masa itu pelaksanaan hukum feodal dan hak pemilikan tanah oleh bangsawan memberi keuntungan besar bagi kelompok bangsawan. Sepanjang abad 18 harga barang di Perancis naik dengan cepat, bersamaan dengan naiknya ongkos Kenaikan ini memberi keuntungan besar, tidak pada petani penggarap tapi kepada pemilik tanah. Hal yang tak jauh beda juga terjadi di Indonesia, misalnya dengan apa yang disebut lembaga sawah negara. Lembaga ini berasal dari awal periode kesultanan dan dipelihara sampai pertengahan kedua abad 19. Dalam tahun 1808 Deandels menghapus sistem ini dan hanya memungut seperlima bagian panen sebagai pajak tanah, dan oleh Rafles beberapa tahun kemudian menjadikan sewa tanah sebagai satu-satunya pajak tanah. Namun bukan berarti seluruh sistem hilang, sebagian *privilage* bagi bangsawan atas hak atas tanah tetap berjalan, bahkan diperparah oleh korupsi dan penyelewengan di kalangan pamongpraja.

Masalah tanah ini perlu disinggung karena diskursus nasionalisme awal sesungguhnya secara riil terkait dengan masalah tanah dan menjadi salah satu agenda penting dimasa sekarang, kesadaran bertanah dan mempertahankan tanahnya, dalam perspektif nasionalisme menjadi kesadaran bertanah air. Tanah air yang sungguh-sungguh milik kami dan harus kami pertahankan, bangsa tanpa tanah air

seperti pohon tanpa akar, tanpa pijakan.

Revolusi Perancis 1789 yang berhasil menggulingkan Louis XVI menggulirkan liberalisme dengan semboyan "*liberte, egalite, fraternite*"-nya yang terkenal. Proyek liberalisme adalah menyusun sebuah pandangan mengenai keadilan yang mempertahankan subyektivitas yang mengarah pada kebaikan. Penekanan pada individu dan hak menjadi tema sentral liberalisme. Titik tekan yang kuat (kalau bukan terlalu kuat) pada individu ini membiarkan tiap individu menemukan sendiri "hidup yang baik" dalam wilayah pilihan individu, yang menyebabkannya jatuh pada pembatasan diri memberikan sebuah teori keadilan tak mungkin dipahami sepihak tapi dalam perspektif intersubyektivitas.

Liberalisme telah melahirkan pasar kapitalis dan mestinya bertanggungjawab atasnya, namun pasar kapitalis dan organisasi produksinya ternyata memiliki paradoks, sebagaimana dikatakan oleh Poole: "Pasar kapitalis dan organisasi produksi telah menempatkan individu di dalam jaringan saling ketergantungan-ketergantungan yang lebih luas daripada yang ada dalam bentuk-bentuk masyarakat lainnya, Akan tetapi paradoksalnya pasar dan organisasi produksi itu juga berfungsi memisahkan individu dari ikatan-ikatan yang konstitutif dengan individu-individu lainnya, sekurang-kurangnya dalam dunia publik."

Hal ini menciptakan kekosongan nilai-nilai dan jati diri individu di hadapan sosialitasnya. Kekosongan nilai, nihilisme, dalam dunia modern termanifestasi dalam situasi absurd. Situasi yang tak terpahami oleh subyek-subyek yang mengalaminya. Seperti Sisifus, Raja Korinte, yang terus menerus mendorong batu ke puncak bukit meski batu itu bakal terguling lagi ke bawah.

Albert Camus merefleksikan Revolusi Perancis dan modernitas dalam *The Rebel* dan sampai pada kesimpulan bahwa pemberontakanlah yang harus dilakukan atas situasi absurd.

Apa yang dituntut Camus adalah sebuah nilai yang menyatukan individu-individu, sebuah intersubektivitas, yaitu sebuah solidaritas sosial yang melampaui keindividualannya. Di abad XVIII tuntutannya itu dijawab oleh nasionalisme yang sering dikaitkan dengan liberalisme. Nasionalisme dalam menarik persekutuan di dunia modern dengan diktum politik tentang negara kebangsaan (*nation state*) Nasionalisme memperkenalkan identitas nasional sebagai tali pengikat diri dan dengan demikian jati diri individu. Identitas nasional adalah sebetulnya kesadaran diri, ia juga kesadaran orang lain. Kesadaran itu mengidentifikasi mereka yang memiliki identitas itu, dan mereka yang wajib kita bantu.

Diskursus nasionalisme memuncak pada pernyataan Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda telah meleburkan cara pandang sempit yang lokal ke dalam cara pandang baru yang lebih luas namun integratif. Nasionalisme 1928 menyatukan tanah air, bangsa, dan bahasa sebagai batu pijakan pergerakan. Tanah menjadi tempat berpijak suatu bangsa dan bahasa sebagai identitasnya. Tanah sebagai batu pijakan ini terartikulasi dalam pemikiran Ross Poole tentang negara kebangsaan : "Negara kebangsaan memberi para anggotanya milik bersama yang tak dapat direbut: tanah tempat mereka memiliki hak untuk mengarahkan hidup mereka, negara kebangsaan dengan demikian memulihkan hubungan dengan tanah-lokasi spasial dan jati diri spasial- yang bagi kebanyakan orang telah dihancurkan dunia modern". Tanah air menjadi dimensi ruang dalam negara

kebangsaan, dan sejarah menjadi dimensi waktunya. Hal yang sama diungkapkan Soekarno dalam pidato *Lahirnya Pancasila* ketika meletakkan nasionalisme sebagai dasar negara Indonesia dengan menekankan kesatuan manusia dan tempatnya: "Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya".

Bila tanah jadi pijakan, maka bahasa merupakan kunci identitas nasional yang penting. Bahasa adalah medium untuk berkomunikasi. Tiap warga negara dapat mengekspresikan sesuatu dengan bahasa tertentu yang dapat dipahami orang lain dari sosialitasnya yang menunjukkan ikatan komunitas itu. Perlu dicatat bahwa nasionalisme sendiri tidak bergantung pada bahasa, tetapi diperlukan sebagai media bagi warga suatu bangsa. Jadi bahasa boleh jadi sebuah komponen penting dalam eksistensi kebangsaan, tapi tidak berarti dia *sine qua non*.

Neopotisme dan Nasionalisme

Cikal bakal kelahiran nasionalisme secara jujur amat bercampurbaur dan mengelirukan. Untuk menetapkan dan menyalahi Barat semata-mata karena melancarkan sesuatu ideologi baru yang memecah-belahkan umat Islam adalah menyesakkan.

Sejarawan Islam mencatat mengenai permulaan elitisme Quraisy dalam dasar pemerintahan Sayidina Utsman R.A. Perselisihan Sa'ad bin Abi Waqosh dan Abdullah bin Mas'ud, pelantikan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ath di Kufah, penawaran tanah-tanah rampasan perang untuk dijual kepada penduduk Hijaz, pemecatan Abu Musa al-Asy'ari R.A. sebagai Gubernur Basrah, pemecatan Amr bin Ash dari jabatan Gubernur Mesir, pelantikan Muawiyah Abu Sofyan sebagai pemerintah

tunggal Damsyik dan kontroversi demi kontroversi lalu mengarah kepada pembunuhan Sayidina Utsman.

Sekiranya nasionalisme yang dimaksud di sini adalah faham kesukuan yang sempit, terlalu melebihkan kaum sendiri hingga mengesampingkan prinsip keadilan yang diutarakan oleh Islam dan Rosulullah maka ia telah dahulu mengawali dalam sejarah Islam. Ia bercabang kepada nepotisme dan kronisme. Kita tidak perlu membicarakan tentang ini karena walaubagaimanapun kacau sekali percaturan politik Khulafa al-Rosyidin, mereka tatap sahabat-sahabat Rosulullah dan telah melalukan pengorbanan yang tiada bandingnya sedikitpun. Juga, tentulah ada hikmahnya, jalur dan aturan sejarah sedemikian rupa seperti yang telah direncanakan oleh Allah.

Nasionalisme yang akan disoroti di sini adalah gerakan nasionalisme modern dan perkembangannya, apakah benar ia didalangi Barat?, dan bagaimana reaksi Barat yang sebenarnya terhadap nasionalisme.

J.R Thackrah dalam politik (1987) melihat nasionalisme dari sudut yang menarik dan dapat menimbulkan perdebatan dikalangan kita. Beliau menulis: *"The concept of nation does not refer to common historical, ethnic, linguistic or religious background alone. It is based on the people's feelings. Do they feel that they belong to the same group and share the same visions of the future? This feeling is nationalism."*

Sedangkan sosiologis Islam tersohor Ibnu Khaldun telah merenungi masalah ini dengan begitu jauh di dalam muqoddimah. Ibnu Khaldun menyamakan sifat ar-rahmi atau pemuliaan ikatan darah sebagai sesuatu yang fitrah. Ikatan ini membuahkan

nu'arah pada kaum keluarga atau *zawi al qurba wa ahlal arham*, maka perasaan yang terbangkit ialah rasa malu atau terancam jika kerabatnya ditimpa keaiban atau serangan. Pertalian yang erat hasil dari pergaulan ini pastinya melahirkan pula apa yang dinamakan sebagai *al ittihad wa litiham* atau persatuan dan pergaulan.

Jelasnya politik atau ideologi kesukuan ini telah lahir dalam diri manusia dan dalam konteks bangsa Arab, telah dilaksanakan sejak zaman pra Islam. Menurut Ibnu Khaldun lagi tujuan *assabiyyah* (cinta kaum) ialah kuasa (*al-mulk*). *Assabiyyah* akan memberi perlindungan, memungkinkan pertahanan bersama sanggup mengemukakan tuntutan dan desakan serta kegiatan kemasyarakatan. Harus tidak dilupakan Rasulullah sendiri dalam arti kata lain, dakwah Islamiyah sedikit banyak telah mendapat perlindungan dari faham suku ini, terutama di era awal Islam. Rujuk peristiwa bagaimana baginda Nabi Muhammad mendapat suaka politik (*himayah wal jiwar*) dari mut'am bin Adi, seorang bangsawan Quraisy yang kafir semata-mata oleh rasa kesukuan ini. Atau bagaimana Bani Hashim sedikit banyak melindungi Nabi Muhammad ketika teretusnya permulaan ekonomi ke atas orang-orang Islam di Makkah selama tiga tahun.

Sebenarnya di dalam Islam garis besar memisahkan sesuatu bangsa itu ialah agamanya (*la farq bayn 'arabi wa'ajami illa bi-taqwa*). Oleh karena itu krisis antara kaum, dalam sejarah Islam sebetulnya adalah persoalan persaingan etnik bukan nasionalisme. Abdul Rahman al Bazzaz menulis: *"True nationalism and the genuine Islam cannot go apart and could never be rivals. On the contrary, they go side along for paths."*

Kebangsaan yang sebenarnya dan semangat Islam yang tulen tidak terpisah malah tidak mungkin bersaing. Malah nasionalisme dan Islam beriringan. Jelasnya Bazzaz meletakkan faktor kuatnya ikatan sejarah bangsa Arab dengan Islam tidak terpisah, oleh itu mencintai Arab adalah serupa saja mencintai Islam. Sekurangnya, pandangan beliau tidak segila pandangan sekuler ini *al-din li-Allah wa-al-watan li-al-jami'* nyata bertentangan sekali dengan hakikat Islam.

Pandangan Bazzaz nyata adalah pandangan yang bias dipegang oleh orang-orang Indonesia pada umumnya. Kita sering memandang jelek kepada nasionalisme ini tanpa menyadari kita berada di bawah lindungan bayang-bayang setiap waktu. Nasionalisme yang sederhana sehingga tidak berlaku dzalim dan menyampingkan prinsip keadilan adalah nasionalisme yang diterima. Akan tetapi jenis faham nasionalisme yang datang dari konspirasi barat ditiupkan dikalangan umat Islam hingga memecah belah mereka. Inilah yang terjadi adalah nasionalisme keberpihakan. (Faisal Tehrani 1999: 4).

Menurut George Antonius dalam *The Arab Awakening* (1938), gerakan nasionalisme modern pertama kali di dunia Islam bermula di Beirut pada tahun 1875 secara rahasia. Gerakan kebangsaan ini menular secara perlahan-lahan tetapi menyusuk karena beberapa faktor kemudahannya.

Kemerosotan pemerintahan Utsmaniyyah

Era Tanzimat al-Khairiyah dalam jajahan empayer Islam. Ini adalah era modernisasi dan reformasi untuk memilih dan menerima ide-ide barat yang bagus tetapi pelaksanaannya tidak dikawal dan penghayatan Islam yang makin lemah

memudahkan segala jenis budaya barat yang tidak tersaring langsung diimport masuk dalam wilayah Islam. Perluasan kekuasaan Barat ke atas Negara-negara Islam, paling kelihatan dan mengagetkan adalah bila Perancis melawan Mesir dalam tahun 1789.

Peranan misionaris Eropa dan Amerika

Mereka mendirikan Syrian Protestant College (sekarang American University of Beirut) dan University of St. Joseph diresmikan pada tahun 1866 dan 1875. Menurut George Antonius, Syrian Protestant College inilah yang bertanggungjawab melahirkan nasionalisme arab buat pertama kalinya. Terdapat beberapa faktor sampingan lain yang memudahkan nasionalisme bersarang di rumah orang-orang Islam. Antaranya sentiment anti Turki yang bermula di Lubnan, ide-ide politik kesan dari Revolusi Perancis, kebangkitan semula bahasa Arab melibatkan percetakan surat kabar Arab, perjalanan orang-orang Arab yang lebih jauh ke dunia Barat, dan kepulangan semula penghijrah Arab setelah tinggal lama di Amerika. Namun tidak ada yang lebih besar sumbangannya, melainkan terwujudnya club-club sastera Arab oleh kumpulan-kumpulan pelajar dan siswa di University-university yang dibiayai oleh misionaris.

Orang-orang arab Kristen kemudian menuntut otonomi dari pemerintahan Utsmaniyyah di Istanbul karena mereka kurang nyaman dengan gaya tradisional Turki. Mereka telah banyak terpengaruh dengan ide-ide barat. Perlahan-lahan intelek Islam turut menyumbang dan mendukung tuntutan mereka. Suatu garis sejarah yang besar perlu dicatat, bagaimana pemuda Turki mendirikan The Committee of Union and Progress yang kemudian berhadapan

dengan masalah Pemuda Arab. Peningkaran janji yang dibuat di Paris Congress of 1907 menelurkan kegelisahan dan kekecewaan.

Jamiyah al-Arabiyah al-Fatah yang dikumandangkan di Paris 1909 adalah pendirian pertama yang tersusun dan meletakkan rahasia besarnya yaitu untuk memisahkan negara-negara Arab dari pemerintahan Turki. Harus diingat pendirian ini tidak menyatakan tujuan mereka secara terang-terangan, kenapa pada masa yang sama gerakan reformasi Islam lebih bersemangat. Tokoh-tokoh reformis Islam seperti Jamaluddin al-Afghani (1839-1897), Muhammad Abduh (1849-1905) dan Abdul Rahman al-Kawakibi (1849-1903) lebih segar kritik dan penentangan mereka terhadap tradisionalisme kerajaan Othmaniyyah. Gerakan nasionalisme al-Fatah tadi menjadi lebih perlahan dan berahasia karena ide solidaritas afganistan dan rekan-rekannya tidak menolak nasionalisme. Abduh pula menganggap cinta bangsa dan negara sebagai tanggungjawab agama. Sedangkan kawakibi menyatakan memang ada perbedaan antara Arab dan bukan Arab dalam komunitas Islam.

Beda reformis Islam ini dan sekularisme-nasionalisme adalah jelas yaitu reformis Islam mempercayai pemulihan agama (tajdid) dari kepercayaan yang lapuk dan khayalan bodoh untuk memungkinkan semula kebangkitan Islam dibandingkan pandangan Ibrahim al Yaziji dan Nagib Azouri yang mau memisahkan realitas agama dari tindak-tanduk nasional itu sendiri.

Ciri-ciri sekuler-nasionalis ialah: program-program berdasarkan *Anglo-Saxon Liberalism*. Ini melibatkan pemisahan agama dan negara, pengenalan kepada teknologi modern, peningkatan dalam pendidikan, menggalakkan keterlibatan

penduduk asli dalam menumbang pendapatan ditingkat kebangsaan, meluaskan politik, kebebasan sosial dan reformasi prosedur pemerintahan. Gerakan nasionalisme ini sama dengan gerakan sosialisme ketika itu, perlahan-lahan gerakan kebangsaan Arab menjadi besar dan kuat menjelang dan sesudah perang dunia kedua. Kejatuhan Othmaniyyah secara otomatis menyemarakkan lagi gerakan ini dalam tempo yang tidak lama, ia menjangkiti wilayah-wilayah Islam yang lain termasuk Indonesia. Seperti yang telah disebut di sini, nasionalisme secara sederhana, sadar atau tidak semacam telah menjadi pegangan kita, dan ia diterima dengan memadai oleh kebanyakan tokoh reformis. Akan tetapi apakah ia garis panduan untuk kita mengukur nasionalisme itu dibenarkan atau tidak atau nasionalisme menyimpang atau tidak.

Rosulullah secara tidak langsung telah memberi isyarat, sesuai dengan tindak-tanduk sahabat terdahulu sebagai panutan, bukankah Rosulullah yang menyatakan kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, akan kupotong tangannya. Ini menggambarkan bahwa rasa cinta terhadap kaum kerabat tidak boleh melupakan keadilan di dalam Islam. Juga Amr bin Ash yang memerintah Mesir, tidak canggung menghukum anak sendiri bila berlaku perselisihan dengan seorang Arab Badwi ketika mereka bermain lomba kuda. Jelasnya, nasionalisme yang mengarah kepada ketidakadilan atau kezaliman adalah terlarang dan dikira bersalah dengan Islam karena Islam hanya menerima prinsip keadilan. Terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur'an seputar cemoohan Allah dan azab keatas pendzolim, akan tetapi ulama' seperti Hasan Al Banna, Nawab Safawi, Syed Qutb, Ghazzali dan Maududi menjelaskan Islam tidak memerlukan

nasionalisme sebagai formula solidaritas karena sifat Islam itu sendiri sudah jelas memberi kelebihan dalam kesatuan.

Awalnya baik-baik saja setelah perang dunia pertama, Ulama' Azar adalah penentang kuat kepada nasionalisme, diantaranya ialah: Muhammad Abu al- Fadl al- Jizawi, Mufti Mesir Abdul Rahman Qurrah, kemudian Syeh Muhammad Ghunaimi membantah faham iqlimiyah dan Syeh Mustafa Al- Maraghi, reaktor Azhar yang baru. Tetapi dua tiga tahun sebelum perang Dunia kedua, bantahan-bantahan ini mulai merosot, barangkali karena tiga sebab besar: Revolusi Juli yang menumbangkan sistim monarkhi di Mesir.

Kebangkitan Jamal Abdul Naser dan Perluasan kekuasaan Zionis

Kekeliruan dengan apa yang sekarang dinamakan nepotisme dan kronisme. Konklusinya, konsep nasionalisme ini ada batasnya untuk diterima. Sayidina Umar telah mengkhawatirkan awal-awalnya apabila Sayidina Utsman dilantik sebagai kholifah, tentulah beliau akan mengutamakan Bani Umayyah hingga tiba satu masa rakyat bangkit membunuhnya. Duka cita sekali, ketakutan Sayidina Umar itu menjadi kenyataan. Ia menjadi benar-benar jelas ketika pemerintahan Bani Umayyah suku Arab dan non Arab benar-benar dirangsang nasionalisme hingga Hajjaj Yusuf mengeluarkan perintah, tiada seorang 'ajampun boleh mengimami sholat umum di Kufah. Akibatnya golongan 'Ajam, dengan segala diskriminasi dan tekanan, mendukung gerakan Abbasiyyin untuk menggulingkan Bani Umayyah dengan harapan ketidakadilan ini akan berubah. Sebaliknya keadaan menjadi lebih buruk di mana konsep *divide et impera* telah dilaksanakan begitu meluas. Malah Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin

Abbas, imam gerakan Abbasiyyin mengeluarkan perintah berbunyi: "Jika engkau ragukan kebangsaan Arab seorang anak kecil yang panjangnya lima jengkal, maka bunuhlah dia."

Penjajahan ke atas umat Islam oleh penguasa-penguasa Barat dan pemberian kemerdekaan secara bersaing mempercepat lagi perkembangan nasionalisme di dunia Islam. Oleh karena itu Barat tidak boleh disalahkan secara total karena memang sikap kesukuan dan faham kebangsaan ini sudah menjadi satu sifat bagi diri manusia itu sendiri. Umat Islam yang lemah daya tahan, kejahilan umat dan kelesuan Ulama penyebab mereka temakan akibat nasionalisme modern yang disuntikkan Barat dan didalangi oleh individu-individu kelahiran Islam lebih mudah. Nasionalisme tidak boleh disingkirkan dari diri kita begitu saja karena memang fitrah manusia mencintai kaum dan bangsanya. Cuma nasionalisme akan menjadi sesuatu yang terlarang dan puncak kerusakan umat apabila ia dibiarkan merajalela hingga keadilan, prinsip yang sangat dianjurkan Islam dikesampingkan.

Berdasarkan realitas semasa dan situasi masyarakat kita, nasionalisme tidak dapat disangkal pernah menjadi faktor pemersatu (*unifying force*) dalam mengangkat martabat Islam itu sendiri, bahkan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan kita telah menyatukan sentimen bangsa dan agama untuk menggerakkan jihad menentang kaum kolonialis atau kaum penjajah Belanda waktu itu. Sebetulnya nasionalisme itu adalah suatu jebakan bagi kaum muslimin, karena sebenarnya nasionalisme adalah suatu pemikiran barat pada awalnya disebarikan untuk menghancurkan ke kholifah Utsmani, karena orang-orang barat pengecut itu tau bahwa mereka tidak akan dapat menang perang

melawan kaum muslimin jika berperang dengan kekuatan fisik, oleh karena itu, orang-orang barat itu mengirim orientalis dan agen-agen mereka untuk menghancurkan umat Islam dengan cara mencerai-beraikan dulu umat Islam agar tidak sekuat saat itu maka mulailah mereka menyebarkan pemikiran nasionalisme di benak kaum Muslimin, dan akhirnya mereka berhasil memperdaya umat Islam dengan pemikiran nasionalisme mereka dan menghancurkan umat juga memecah kekuatan umat Islam yang terbesar yaitu kekhilafahan.

Nasionalisme sebagai Tantangan

Nasionalisme telah merupakan tantangan terbesar bagi kaum *proletar* atau kaum buruh yang "tidak mempunyai tanah air," demikian dikatakan oleh Marx dan dalam *Communist Manifesto*. Dalam semangat ini kaum Marxis melancarkan politik pertama yang mempunyai aspek internasionalisme dan mendeklarasikan solidaritas kemanusiaan yang mengglobal dan juga menjadikan penghapusan state sebagai salah satu tujuan akhir dari perjuangan kaum Marxis. *International Workingman's Association* (yang lebih sering dikenal sebagai Internasional sebagai gerakan politik Internasional, gerakan ini didirikan pada tahun 1864 sebagai sebuah gerakan politik internasional. David McNally (1999).

Beberapa Bentuk Nasionalisme

Nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebahagian ideologi negara atau gerakan (bukan negara) yang populer berdasarkan pendapat sipil, etnik, budaya, keagamaan dan ideologi. Kategori tersebut lazimnya saling kait mengkait dan kebanyakan teori nasionalisme mencampur-adukkan sebagian atau semua elemen

tersebut.

Nasionalisme romantik, adalah biasa dinamakan Nasionalisme organik, nasionalisme identik, yaitu lanjutan dari nasionalisme etnik dimana negara memperoleh legitimasi politik secara undang-undang, hasil dari pada bangsa atau ras; menurut semangat romantisme. Nasionalisme romantik ini bergantung kepada kewujudan budaya etnik yang menepati idealisme romantik, kisah tradisi yang telah direka untuk konsep nasionalisme romantik. Misalnya "Brothers Grimm" yang dinukilkan oleh Herder merupakan koleksi kisah-kisah yang berkaitan dengan etnik Jerman.

Nasionalisme Budaya, adalah sejenis nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya "sifat keturunan" seperti warna kulit, ras dan sebagainya. Contoh yang terbaik adalah rakyat Cina yang menganggap negara adalah berdasarkan kepada budaya. Unsur ras telah dinomor duakan dimana golongan Manchu serta ras-ras minoritas lain masih dianggap sebagai rakyat negara Cina. Kesediaan dinasti Quing untuk menggunakan adat istiadat Cina membuktikan keutuhan budaya Cina. Malah banyak rakyat Taiwan menganggap diri mereka nasionalis Cina sebab persamaan budaya mereka tetapi menolak Cina karena negeranya berpaham komunisme.

Nasionalisme keagamaan, ialah sejenis nasionalisme dimana negara mendapat "political legitimacy" dari persamaan agama. Zionisme di Israel adalah satu contoh yang baik. Walaupun begitu, lazimnya nasionalisme etnik adalah dicampuradukkan dengan nasionalisme keagamaan. Misalnya, di Irish semangat nasionalisme adalah berujung dari persamaan agama mereka yaitu katolik; nasionalisme di India seperti yang dilakukan oleh pengikut partai BJP adalah berawal dari

agama Hindu. Namun demikian, bagi kebanyakan kumpulan nasionalis agama hanya merupakan simbol dan bukannya motivasi utama kumpulan tersebut. Misalnya pada abad 18, nasionalisme kaum Irish dipimpin oleh mereka yang menganut agama protestan. Gerakan nasionalis di Irlandia bukannya berjuang untuk memartabatkan teologi semata-mata. Mereka berjuang untuk menegakkan ideologi yang bersangkutan dengan Irlandia sebagai sebuah negara merdeka terutamanya budaya Irlandia. Justeru itu, nasionalisme kerap dikaitkan dengan kebebasan.

Sebaliknya Islam, menentang nasionalisme, Tribalisme (perbedaan kaum), rasisme, atau semua bentuk diskriminasi manusia yang tidak berdasarkan kepada kepercayaan seseorang itu. Islam menggalakkan keharmonisan masyarakat Islam atau Ummat. Penduduk Islam seluruh dunia tidak pandang bangsa, warna kulit dan keturunan adalah mempunyai kiblat yang sama, berpuasa pada bulan romadlon yang sama serta menunaikan Haji di ka'bah yang sama. Malah sewaktu menunaikan haji atau umroh, semua wajib memakai kain ihrom putih yang sama. Perkataan ummah selalu disalah terjemahkan kedalam bahasa Inggris sebagai negara (nation) (berlainan dengan gerakan "Nation of Islam" dan ini bertentangan dengan ajaran Islam dan ditolak oleh kebanyakan orang Islam.

Perkembangan Nasionalisme di Indonesia

Nasionalisme merupakan produk dari adanya kolonialisme, perkembangan awal nasionalisme secara internal berawal dari adanya rasa kesadaran yang terus berkembang, yaitu kesadaran terhadap situasi yang tertindas, terbelakang, dan diskriminasi yang melahirkan suatu

keinginan untuk bebas, merdeka dan maju. Sedangkan secara eksternal, dipengaruhi oleh kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905, kemudian gerakan Turki Merdeka, Revolusi Cina, dan gerakan-gerakan nasional di negara-negara tetangga, seperti India dan Philipina. Peristiwa-peristiwa tersebut memperbesar kesadaran nasional dan menyebabkan bangsa Indonesia memiliki rasa harga dirinya kembali. Artinya, setelah kemenangan Jepang atas Rusia, muncul kesadaran dari kalangan pemuda dan mahasiswa Indonesia bahwa ternyata orang Asiapun mampu mengalahkan orang Eropa. Meskipun dimensi eksternal ini juga berpengaruh, akan tetapi pengaruh internal inilah yang paling dominan, sebab sangat dirasakan langsung oleh bangsa Indonesia.

Adapun bentuk gerakan dari proses awal perkembangan nasionalisme Indonesia adalah munculnya "Gerakan Emansipasi Wanita" yang dipelopori oleh R .A. Kartini pada tahun 1912, kongres Pemuda pertama dan berdirinya Boedi Oetomo tahun 1908, Gerakan Jawa Muda (jong Java) tahun 1911, gerakan Pribumi (Inlandsche Beweging) tahun 1914, Kongres Kebudayaan tahun 1916, dan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 (1972:54-55), berdirinya organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda, yaitu Indische Vereeniging tahun 1908, kemudian berkembang dan berubah menjadi organisasi identitas nasional yang baru pada tahun 1925 dengan nama baru Perhimpunan Indonesia dan berubah lagi menjadi "Indonesia Merdeka", berdirinya Sarikat Islam (SI) pada tahun 1912 yang dipelopori oleh Tjokroaminoto, dan berdirinya PNI tahun 1927 (Ingleson, 1983:1-4, 31), dan berbagai bentuk organisasi kepemudaan, dan organisasi lainnya yang lebih bersifat kesukuan, seperti Jong Sumatra, Jong Celebes dan lain-lainnya.

Meskipun muncul berbagai gerakan yang lebih bersifat kesukuan, seperti Boedi Oetomo, Jong Java Jong Sumatera dan Jong Celebes, akan tetapi pada akhirnya dapat dipersatukan oleh berbagai gerakan atau organisasi lainnya yang lebih bersifat integratif karena merangkul berbagai gerakan kesukuan antara lain gerakan pribumi, Perhimpunan Indonesia, dan puncaknya saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Perhimpunan Indonesia (PI) dikatakan sebagai suatu bentuk gerakan yang lebih mengarah kepada "Ideologi Nasional" antara lain (1) Kesatuan Nasional: perlunya mengesampingkan perbedaan-perbedaan sempit dan perbedaan berdasarkan daerah dan perlu dibentuk suatu kesatuan aksi melawan Belanda untuk menciptakan negara kebangsaan Indonesia yang merdeka dan bersatu; (2) Solidaritas: tanpa melihat perbedaan yang ada antara sesama orang Indonesia, maka perlu disadari adanya pertentangan kepentingan yang mendasar antara penjajah dan yang dijajah, dan kaum nasionalis haruslah mempertajam konflik antara orang kulit putih dengan kulit sawo matang; (3) Non-Kooperatif: keharusan untuk menyadari bahwa kemerdekaan bukan hadiah sukarela dari Belanda, akan tetapi harus direbut oleh bangsa Indonesia dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri dan oleh karena itu tidak perlu mengindahkan dewan perwakilan kolonial seperti *Volksraad*; (4) Swadaya: dengan mengandalkan kekuatan sendiri perlu dikembangkan suatu struktur alternatif dalam kehidupan nasional, politik, sosial, ekonomi dan hukum yang kuat berakar dalam masyarakat pribumi dan sejajar dengan administrasi kolonial.

Dari keempat bentuk ideologi nasional dari organisasi perhimpunan Indonesia (PI) seperti di atas, menunjukkan pada kita, dan menjadi suatu bukti nyata bagaimana

ideologi itu muncul sebagai suatu bentuk reaksi terhadap kolonialisme Belanda. Bahkan ideologi tersebut dianggap sebagai suatu manifestasi dari kesadaran dan rasa nasionalisme yang tinggi. Fenomena di atas menunjukkan bahwa kesadaran akan keteringgalan dan kungkungan kolonialisme, serta munculnya gerakan-gerakan pemuda, terutama para mahasiswa dan kaum terpelajar lainnya. Seperti dikemukakan oleh Anderson (1990:161) bahwa umumnya diakui bahwa kaum terpelajar merupakan pemain-pemain inti dalam kebangkitan nasionalisme di wilayah-wilayah jajahan, bukan hanya kolonialisme menjamin kelangkaan relatif tuan-tuan tanah, pedagang besar, wirausahawan swasta, bahkan juga kelas profesional besar pribumi. Lebih lanjut Anderson mengatakan bahwa umum pula diakui bahwa peran "perintis garis depan" yang dipangku kaum terpelajar pribumi berasal dari kemelekehurufan dan dwibahasa mereka, atau mungkin lebih tepat lagi kemelekehurufan dan kemampuan dwibahasa.

Keberadaan Nasionalisme hingga sekarang

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh seluruh warga negara Indonesia dianggap sebagai hari kebebasan dari belenggu penjajahan atau kolonial. Bahkan dianggap sebagai fase dari segala puncak pergerakan nasional. Apakah setelah fase ini rasa nasionalisme mulai pupus dan kendor? Jika kita mengikuti apa yang dikemukakan oleh Anderson seperti tersebut di atas, tidak berarti bahwa rasa nasionalisme dan komitmen kebangsaan mulai hilang. Akan tetapi nasionalisme pada tatanan global telah berakhir dan beralih ke dalam nasionalisme dalam tatanan lokal.

Maksudnya, rasa nasionalisme yang dipupuk dan dikembangkan bukan lagi sebagai wujud respon dari kolonialisme, akan tetapi kebersamaan yang lahir dan tumbuh dari rasa senasib dan sepenanggungan, dan komitmen bersama untuk mempertahankan keutuhan wilayah republik Indonesia dan menyusun langkah-langkah selanjutnya menuju proses pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat.

Karena republik ini lahir dari perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia, maka rasa memiliki secara bersama begitu kuat. Akan tetapi selama masa kemerdekaan, proses pembangunan politik, birokrasi pemerintahan dan pembangunan secara sosial-budaya dan ekonomi mengalami berbagai ketimpangan dan ketidakpuasan dari berbagai pihak atau kelompok. Akibat, munculnya berbagai akibat langsung yang tidak disadari, yaitu lahirnya berbagai bentrokan kepentingan politik, ketidakpuasan dan peta-peta politik baru yang justru dapat menghambat proses pembangunan bangsa yang telah menjadi komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya muncul dari kalangan pemerintah dan pejabat atau organisasi di sekitar pemerintah pusat, akan tetapi justru banyak yang muncul di luar daerah. Implikasinya lebih lanjut jika reaksi ini tidak terakomodir adalah, akan semakin menguatkan rasa sentimen kelompok politik tertentu atau sentimen kedaerahan. Jika demikian, maka lahirlah rasa nasionalisme baru yang lebih bersifat "lokal" atau apa yang disebut sebagai "etnonasionalisme" (Kartodirdjo, 1998:53). Sebagai contoh, sekitar tahun 1950 hingga 1960-an muncul gerakan-gerakan politik dalam negeri yang ingin melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), misalnya Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, Republik

Maluku Selatan (RMS), dan beberapa lagi kasus lain yang serupa. Sebenarnya, gerakan atau organisasi yang lebih bercorak etnis atau kedaerahan telah muncul sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, yaitu sejak tahun 1908 saat berdirinya Budi Oetomo, Sarekat Ambon, Roekoen Minahasa, Pasoendan, Sarekat Soematera (Kartodirdjo, 1972:62) atau munculnya Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan Jong Celebes. Meskipun demikian, kemunculan organisasi kepemudaan dengan corak etnis atau kedaerahan ini dianggap sebagai gerakan pendahuluan dari pergerakan Nasional lebih lanjut atau "Proto-Nasionalisme" (Kartodirdjo, 1998:55). Dengan suatu asumsi bahwa kesadaran yang muncul dari para pemuda dengan latar budaya dan etnis mereka, dilatari oleh suatu kesamaan nasib yaitu ketertindasan dan ketertinggalan yang disebabkan oleh kolonialisme. Karena kesamaan tersebut, akan lebih memudahkan merangkul dan mempersatukan ke dalam suatu bentuk organisasi atau pergerakan nasional yang tidak mencerminkan suatu etnis tertentu, akan tetapi mencerminkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Akan tetapi jika kita kembali melihat fenomena perkembangan politik kita dewasa ini, gerakan-gerakan dan sentimen kedaerahan yang muncul sekitar tahun 1900-an, tahun 1960-an muncul kembali pada tahun masa sekarang ini dengan tuntutan yang sama, yaitu ingin memisahkan diri dari NKRI, yang kesemuanya itu muncul sebagai reaksi atas ketidakpuasan mereka mengenai proses pembangunan secara fisik, sosial, budaya dan ekonomi yang tidak berimbang atau timpang selama masa kepemimpinan Orde Baru hingga sekarang.

Jika kita membandingkan nasionalisme yang lahir pada zaman pergerakan nasional

dengan nasionalisme yang muncul tahun-tahun belakangan ini, nampak perbedaan yang cukup mendasar, meskipun terdapat persamaan. Persamaannya yang dapat kita lihat adalah nasionalisme pada zaman pergerakan nasional yang lebih bersifat global dan nasionalisme sekarang yang lebih bersifat lokal, lahir dan muncul sebagai suatu bentuk respon akan kesadaran ketidakadilan, merasa terjajah, tertinggal dan cinta tanah air. Sedangkan perbedaannya adalah, munculnya kesadaran dan sentimen nasionalisme pada zaman pergerakan nasional lebih disebabkan oleh perasaan ketertinggalan, kebodohan, tertindas, dan kemiskinan sebagai akibat dari ideologi kolonialisme Belanda, sedangkan nasionalisme sekarang lebih disebabkan oleh munculnya perasaan ketimpangan pembangunan daerah dan pusat, alokasi dana yang tak seimbang, dan merasa adanya perasaan dieksploitasi oleh pemerintah pusat di Jakarta. Bahkan ada pula yang mendikotomikan antara pembangunan yang lebih berorientasi Jawa dibandingkan luar Jawa, ketidakadilan dan ketidakseimbangan birokrasi pemerintahan antara Jawa dan luar Jawa. Bahkan perbedaan yang paling mendasar adalah, nasionalisme yang lahir pada zaman pergerakan nasional lebih bersifat sebagai perekat untuk mempertahankan keutuhan bangsa (bersifat integratif), sedangkan nasionalisme sekarang ini lebih bersifat mengancam keutuhan dan persatuan bangsa (lebih bersifat disintegrasi).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa nasionalisme telah mengalami proses transformasi dari global ke lokal, dan dari integrasi ke dis-integrasi nasional.

Penutup

Dari pembahasan di atas, bahwa antara nasionalisme, bangsa/negara dan kewarga-

negara/kebangsaan mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling terkait. Turner (1986) misalnya (via Mohtar Mas'ud, 1998:196) mengaitkan nasionalisme dengan fenomena kewarganegaraan (citizenship). Dalam pengertian ini, nasionalisme dipahami sebagai bagian dari persoalan pengembangan hak dan kewajiban warga negara, yaitu menggalakkan partisipasi sosial dalam suatu komunitas tertentu sebagai anggota yang sah dan legal. Di sisi lain, keterkaitan antara nasionalisme, kewarganegaraan dan bangsa selalu terjalin, sebab masyarakat sebagai warganegara yang sah dari suatu bangsa hanya dapat eksis dan survive jika mereka mampu membangun dan menjaga keutuhan bangsanya. Untuk menuju kearah tersebut, maka kesadaran dan sentimen kebangsaan atau kebanggaan terhadap bangsa yang dimiliki haruslah menyangkut bangsa yang mengakui kita sebagai warga negara yang sah dan legal. ❁

Daftar Pustaka

- Anderson, Benedict. 1999. *Komunitas-komunitas Imajiner: Renungan tentang Asal-usul dan Penyerahan Nasionalisme*. Omi Intan Naomi (penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama dengan Insist.
- Bahar, Saafroedin. *Sumbangan Daerah dalam Proses Nation-Building dalam Regionalisme, dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Hobsbawm, E. J. *Nasionalisme Menjelang Abad XXI*. Hartian Silawat (Penterjemah). Yogyakarta: Tiara Wacana.